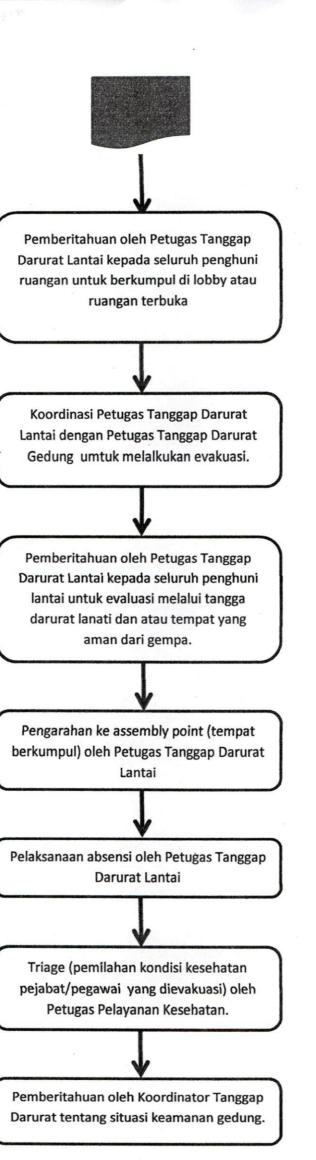


## STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP BENCANA ALAM DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

## A. Kerangka Prosedur. Pemberitahuan oleh pejabat /pegawai penghuni lantai kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai atas adanya gempa bumi. Pemberitahuan oleh Petugas Tanggap Darurat lantai kepada Petugas Tanggap Darurat gedung dan Petugas Tanggap darurat Listrik. Pembunyian alarm atau pengumuman Pemutusan aliran Listrik melalui panel listrik oleh Petugas Tanggap Darurat gempa bumi oleh Petugas Tanggap Listrik **Darurat** Evakuasi Massa Oleh Petugas TanggapDarurat lantai Massa Massa tidak Dapat Dikuasai Dapat dIKUASai





Pemberitahuan oleh Petugas Tanggap Darurat Lantai kepada Petugas Bencana Alam dan Petugas Tanggap Darurat Gedung Bahwa Massa tidak dapat di kuasai

Pelaporan /pemanggilan Petugas Pelayanan Kesehatan oleh Petugas Tanggap darurat Gedung.

## B. Uraian Prosedur

- Pejabat / pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
- 2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
- a.Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi.
  - b.Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrikmelalui panel listrik.
- 4. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (Penghuni Gedung).
- a.Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
   b.Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada;
  - -Petugas Bencana Alam.
  - -Petgas Pelayanan Kesehatan.
- 7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi Untuk evakuasi.
- 8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
- Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
- Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
- 11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan triage ( pemilahan kondisi kesehatan pejabata / pegawai yang dievakuasi ) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
- 12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

NO	JENIS INFORMASI
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT	
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
	<ul> <li>Dalam pengelolaan Organisasi, Administrasi, personil dan Keuangan Dinas Sosial mepedomani:</li> <li>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;</li> <li>13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;</li> <li>14. Beserta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.</li> </ul>
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
	Data ini tersedia pada Daftar Informasi Publik angka 8.
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan c. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
	Data ini tersedia pada Daftar Informasi Publik angka 14.
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
	Data tidak tersedia, karena untuk tahun 2017 program dan anggaran masih menjadi kewenangan Bappelitbangda Kabupaten Mukomuko.
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
	Data tidak tersedia
34.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
	Data belum lengkap.

.